BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengendalian Masalah dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) Di Kabupaten Bandung

Terlepasnya dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah social yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur sangat bervariasi sehingga ini menjadi kendala dalam implementasi program.

Pengendali masalah-masalah publik adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Masalah-masalah publik ada yang mudah dikendalikan, dan ada yang sulit dikendalikan. Tingkat kesulitan masalah-masalah publik ditentukan oleh variasi perilaku, kuantitas kelompok sasaran dan besaran perubahan perilaku yang dikehendaki. Kemampuan untuk mengembangkan pengukur prestasi kerja seperti peningkatan kinerja pegawai melalaui kebijakan-kebijakan untuk peningkatannya. Peningkatan kinerja tersebut untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengembangkan SIM-Data. Bapapsi selalu melakukan pelatihan baik itu di Bapapsi sendiri ataupun SKPD di wilayah Kabupaten Bandung. Pemahaman prinsip sebab akibat dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri, dan perkembangan teknologi menjadi penentu dalam sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan mudah atau tidaknya masalah dikendalikan dan yang selalu menghambat suatu proses pembangunan yaitu masalah ketersediaan anggaran, terbatasnya anggaran menjadi permasalahan klasik dalam suatu pemerintahan, apabila anggaran tidak ada maka proses pembangunan tidak akan berjalan. Kemampuan sutu instansi dalam menyediakan teknologi yang baik bisa juga mempengaruhi dalam proses implementasi SIM-Data tersebut karena setiap instansis memiliki kecanggihan teknologi yang berbeda-beda. Dan kemamapuan instansi dalam menyediakan teknologi yang memadai.

Hakekat sebuah kebijakan publik adalah harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang. Mudah tidaknya masalah di kendalikan dilihat dari beberapa aspek yaitu dasar hukum, sarana dan prasarana, sasarannya, serta evaluasi dari kebijakan tersebut. Maka dari itu apabila unsure-unsur tersebut di gunakan maka bias dilihat dari kebijakan tersebut masalah mudah atau tidak dikendalikan.

4.1.1 Dasar Hukum Serta Sarana Dan Prasarana Dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) Di Kabupaten Bandung

Dasar hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Dasar hukum tersebut sering dijadikan sebagai sebuah kekuatan hukum dalam sebuah kebijakan. Yang menjadi dasar hukum dalam analisis implementasi kebijakan SIM-Data di Kabupaten Bandung meliputi (1) adanya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (2) adanya berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat daerah.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenahi prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Adanya teknologi yang canggih yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa telah tersedia sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

Berbicara tentang implementasi dalam hal kebijakan publik, maka berbicara pula tentang ukuran keberhasilan kebijakan publik dari hal penerapannya. Implementasi tersebut berkenaan dengan suatu penerapan atau tindakan yang dilaksanakan. Implementasi di pandang secara luas mempunyai

makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktior, organisasi, prosedur, dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Maka dari itu alternatif-alternatif atau tindakan yang berkenaan dengan implementasi dapat dikatakan termasuk pada perumusan suatu kebijakan publik karena dalam perumusan kebijakan publik di dalamnya terdapat beberapa alternatif yang dirumuskan baik berupa permasalahan-permasalahan maupun tindakan-tindakan sebagai upaya untuk menanggulanginya. Sehingga dari perumusan kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan atau dimplementasikan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut.

Jika setelah implementasi kebijakan publik ternyata hasilnya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapinya, maka dapat dikatakan bahwa suatu implementasi kebijakan dalam kerangka kebijakan publik tersebut telah gagal atau tidak efektif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu suatu kebijakan publik haruslah benar-benar dibuat secara matang agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

SIM-Data adalah kumpulan data (data gathering) hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bandung yang dihasilkan dari SKPD Kab/Kec sampai dengan Kel/Desa dan sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi untuk bupati guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Hal ini

merupakan suatu inovasi bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam penerapan *E-government* untuk meningkatkan transparansi laporan

Dasar hukum yang di jadikan landasan dalam pembuatan SIM-Data adalah keputusan Bupati Bandung Nomor 130/kep.145-KPDE/2006 tentang merumuskan kebijakan dan langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan pembangunan basis data pemerintah Kabupaten Bandung. Landasan hukum inilah menjadi acuan dengan di bentuknya SIM-Data tersebut.

Gambar 4.1

Tampilan Server SIM-Data



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung)

Dalam implementasi kebijkan pasti ada sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih baik. Dalam hal implementasi kebijakan SIM-Data memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan SIM-Data tersebut. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Software (Sistem Informasi Manajeman Data)
2. Hardware (Perangkat Kerasa berupa Komputer, printer dan lainnya)
3. Networking (Jaringan LAN, Wireless dan lainnya)
4. SOP (Standar Operasional Prosedur)
5. Komitment (Komitmen semua unit/instalasi yang terkait untuk sama-sama mejalankan sistem karena system tidak akan berjalan tanpa di Input)
6. SDM (sumberdaya manusia adalah factor utama suksesnya sebuah system dimana data diinput dan di proses melalui tenaga-tenaga SMD tersebut)

Sarana dan prasarana yang ada di atas di dalam pelaksanaanya telah tersedia dan sangant mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Kendala yang sering terjadi dalam sarana dan prasarana tersebut yaitu terjadi pada *hardware* dan *networking*-nya ini terjadi karena ada kendala teknis yang sering terjadi didalamnya seperti rusaknya perangkat hardware atau terputusnya jaringan networking.

Sistem Informasi Manajemen data saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini. Serta sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menjalankan SIM-Data tersebut. Dalam hal sumber daya nya BAPAPSI

selaku admin dalam sistem tersebut selalu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kuliatas SDM dalam penggunaan sistem informasi tersebut.

Dalam hal sasaran yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan pembuatan SIM-Data adalah terbentuknya basis data. Kemudian adnya transparansi laporan setiap SKPD dalam hal kegiatan yang dilakukan setiap SKPD dan bupati selaku pimpinan dapat melihat data tersebut. Dan di setiap SKPD di Kabupten Bandung bahwa basis data telah terbentuk karena adanya SIM-Data tersebut.

4.1.2 Sasaran Dalam Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat dilapangan. Data yang baik akan memberikan informasi yang baik. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga pula. Dalam menentukan apakah data tersebut berkualitas atau tidak maka dapat dilihat dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitment para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan

bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

Sebuah sistem terpadu berdasarkan pada anggapan bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan. Integrasi data dicapai melalui “data base”. Pada sebuah sistem pengolahan informasi, “data base” terdiri dari semua data yang dapat dijangkau oleh sistem. Pada SIM berdasarkan komputer, istilah “data base” biasanya dipakai khusus untuk data yang dapat dijangkau secara langsung oelh komputer. Manajemen sebuah “data base” adalah sebuah sistem perangkat lunak komputer yang disebut sebagai sebuah sistem manajemen “data base”. Sesuatu penerapan yang mamakai sebuah item (butir) data akan mengambil item data yang sama, yang hanya sekali disimpan dan disediakan untuk semua penerapan. Suatu peremajaan dari sebuah item data membuatnya sesuai untuk semua pemakaian.

Pengolahan terpadu dicapai melalui sebuah perencanaan sistem secara menyeluruh. Biasanya sistem dirancang sebagai suatu gabungan beberapa subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal. Perancangan sistem ini dapat berupa sebuah komputer pusat besar, atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja beberapa komputer kecil. Gagasan pokoknya adalah paduan terencana dari berbagai penerapan yang layak dan efektif.

Dapat dinyatakan secara jelas bahwa suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-

informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut secara eksternal dapat mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara internal informasi yang diperlukan adalah tentang produk yang akan dihasilkan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

Kesadaran bahwa menggambungkan dan membandingan informasi dari sumber-sumber yang berbeda-beda secara manual itu sulit, dan karena itu memakan waktu banyak. Kebutuhan waktu banyak ini sering menjadi kendala bagi para pengambil kebijakan dan pembuat keputusan, karena tindakan harus ditetapkan dalam waktu singkat. Disamping itu penyimpanan data dalam bentuk yang tidak sempurna, dalam artian data tidak dapat disusun dan dianalisis ulang untuk meyajikan informasi lain.

Kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software. Harus dimiliki setiap SKPD karena perangkat tersebut menjadi sangat vital dalam penerapan SIM-Data di Kabupaten Bandung. Untuk menghilangkan pada sistem manual, diciptakan sistem mekanik yang melibatkan para pegawai untuk memilih-milih data yang ada. Jumlah data yang dimasukkan lebih banyak dari pada yang dapat dilakukan oleh sistem manual. Sehingga pengambilan kembali data lebih mudah, sehingga dapat melayani

berbagai keperluan. SIM-Data bertujuannya memproses data secara efisien, mengontrol proses data, dan memperbaharui basis data di setiap instansi dilingkungan Kabupaten Bandung. Jadi jelas bahwa sasaran yang di capai dalam pembutan SIM-Data yaitu terbentuknya basis data yang sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD dilingkungan Kabupaten Bandung.

4.1.3 Tingkat Perubahan yang Dikehendaki Dalam Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Kemajuan dibidang teknologi komputer dan teknologi informasi saat ini telah sungguh sungguh membawa kemanfaatan yang luar biasa dalam menghadirkan informasi dan memberikan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. pemerintah telah mengembangkan e-gov sebagai suatu sistem dan proses kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih lentur dan responsif untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semaikin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. mengungkapkan bahwa suatu permasalahan sosial pada umumnya akan lebih dapat dikendalikan apabila Tersedia teori yang andal yang mampu menjelakan hubungan antara perubahan perilaku dan pemecahan masalah, persyaratan

teknologinya dipenuhi, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut tidak mahal. Variasi/perbedaan perilaku yang menyebabkan timbulnya masalah relative kecil. Kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan sedang.

Mamasuki millennium ketiga yang ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Setiap SKPD dituntut untuk bias menggunakan teknologi yang ada termasuk penggunaan SIM-Data tersebut. Dalam pembuatan SIM-Data pasti adanya evaluasi dalam sistem tersebut evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh meliputi SDM-nya, jaringanya, *software*, maupun *hardwarenya.* Evaluasi dilakukan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya ganggu di dalam sistem tersebut. SIM-Data sendiri di evaluasi setidaknya sekurang-kurangnya 1(satu) tahun selaku oleh BAPAPSI selaku pemegang admin tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem tersebut, pihak pengelola SIM-data yaitu Bapapsi telah melakukan beberapa hal, antara lain :

1. Pemeliharaan Rutin :
    a. Pemeriksaan/inspeksi terhadap koneksitas LAN dilakukan setiap tahun.
    b. Pemeriksaan koneksitas LAN dilakukan tiap bulan.

c. Pemeriksaan tower/menara dilakukan tiap tahun (termasuk arah pointing antena).

d. Pemeriksaan server dilakukan tiap bulan, sedangkan untuk pemeriksaan computer di SKPD dalam peneriman koneksitas jaringan SIM-Data dilakukan bila ada keluhan dari operator yang bersangkutan.

2. Melakukan koordinasi dan evaluasi yang bersifat kontinu lewat

   a. Pertemuan antar SKPD rutin dilakukan tiap tahun, kecuali ada hal-hal yang mendesak.

   b. kepada SKPD penerima koneksitas jaringan SIM-Data sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, baik kepala pimpinan maupun operatornya.

   c. Sosialisasi fungsi, keunggulan dan potensi Jaringan SIM-Data di setiap pertemuan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Perlindungan terhadap jaringan :

   a. Pemakaian UPS untuk satuan kerja yang memiliki tower

   b. Berusaha melakukan update Anti Virus di setiap SKPD yang terhubung ke dalam jaringan SIM-Data.

4. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kinerja SIM-Data:

   a. Membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan terhadap bentuk laporan-laporan yang dikirim melalui jaringan SIM-Data.

b. Menampilkan data-data laporan dari setiap SKPD dalam SIM-Data yang dapat diakses oleh Operator, agar satuan kerja selau mengetahui laporan dari stiap SKPD di Pemerintah Kabupaten bandung.

Proses-prose di atas merupakan proses di dsalam kebijakan SIM-Data tersebut. Proses tersebut dimulai dari pemeliharaan rutin. Evaluasi dan koordinasi, perbaikan jaringan dan melakukan inovasi terhadap SIM-Data tersebut. Proses itu dilakukan oleh setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung secara berkala dan kontinu.

Keakuratan data dibutuhkan sekali dalam informasi karena jika informasi tidak akurat maka informasi tersebut akan ditinggalkan karena tidak akan ada lagi yang mempercayai terhadap informasi tersebut dan ketetapan waktu dalam memberikan data. Data yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketetapan waktu dalam memberikan data tersebut dimaksudkan agar infomasi dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Semakin tepat data tersebut diberikan maka semakin cepat informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Terbentuknya basis data, kemudian adanya transparansi laporan setiap SKPD dalam hal kegiatan yang dilakukan setiap SKPD dan bupati selaku pimpinan dapat melihat data tersebut. SIM-Data bertujuannya memproses data secara efisien, mengontrol proses data, dan memperbaharui basis data di setiap instansi dilingkungan Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa jelas di bentuknya SIM-Data untuk membentuk basis data serta perubahan secara menyeluruh dari yang secara manual ke secara otomatis..

4.2 Kemampuan Kebijakan dalam SIM-Data di Kabupaten Bandung

Pada prinsipnya perintah eksekutif untuk dapat mensetrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

Salah satu cara untuk memperbaiki implementasi adalah: tindak lanjut. Karena semua hambatan implementasi kebijakan yang efektif, maka disarankan bahwa implementasi dapat diperbaiki jika pengambil kebijakan menindaklanjuti keputusan-keputusan dan perintah-perintah mereka untuk melihat bahwa keputusan dan perintah tersebut telah diimplementasikan dengan tepat.

Ada cara lain untuk memperbaiki implementasi selain tindak lanjut. Langkah pertama dalam mengevaluasi solusi-solusi yang ditawarkan adalah memahami apa yang menjadi hambatan terhadap implementasi dan mengapa terdapat hambatan tersebut. Kemudian kita harus mencoba mengubah situasi

yang menghasilkan faktor-faktor ini. Meski kita telah membahas upaya-upaya untuk mengatasi hambatan terhadap implementasi kebijakan yang efektif, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menjelaskan mengapa implementasi terjadi seperti itu. Dengan latarbelakang ini, kita dapat memahami lebih baik mengapa tidak ada solusi yang mudah bagi kegagalan-kegagalan implementasi dan seberapa besar harapan kita terhadap solusi-solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4.2.1 Hukum Yang Jelas Untuk Mengevaluasi Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Amanat efisiensi pembangunan mensyaratkan untuk dapat diketahui secara substansial dan formal mengenai tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan alat atau perangkat yang dimaksud, untuk mengukur tingkat efektifitas berupa dampak/ efeknya pada sasaran serta efisiensinya. Dalam perkembangannya, aspek yang dievaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input),* keluaran *(output)* dan hasil *(outcome).*

Berdasarkan uraian di atas, pada tataran dasar hukum, evaluasi adalah bagian penting dalam proses pembangunan segala bidang dan harus selalu dilaksanakan dengan baik. Pada tata operasional, sejumlah aspek patut mendapat perhatian dengan baik pula. Beberapa hal operasional penting yang berkaitan dengan evaluasi adalah:

a. Evaluasi kinerja sangat penting untuk mengevaluasi status pembangunan tingkat nasional, keseimbangan atau disparitas regional, meliputi hasil, manfaat dan dampaknya.
b. Berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan, maka evaluasi kinerja dilakukan pada kurun lima tahunan dan tahunan.
c. Evaluasi kinerja sebagai proses yang melekat pada proses pembangunan, memerlukan suatu sistem dengan kejelasan pemeran, proses, mekanisme serta keluarannya.

Dalam wawancara peneliti di badan perpustakaan, arsip dan pengembangan sistem informasi. Dijelaskan seperti halnya juga di dalam SIM-Data tersebut evaluasi terhadap sistem tersebut terus dilakukan mulai dari sistem nya maupun kebijakannya. Seperti dijelaskan diatas evaluasi yang dilakuakn terhadap sistemnya meliputi jaringan, *software,* dan *hardware.* Sedangkan untuk kebijakannya SIM-Data sedang dilakukan evaulasi dengan penyesuaiyan undang-undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di undang-undang tersebut dijelaskan di pasal 2 bahwa informasi harus bersifat:

a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pelaksanaan SIM-Data di Kabupaten Bandung belum mampu menyentuh kepada sektor publik karen SIM-Data masih bersifat internal dan hanya di gunakan oleh SKPD di Kabupaten Bandung saja, tetapi SIM-Data pada saat ini sedang dilakukan evaluasi dan revisi disesuaikan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

4.2.2 Tujuan yang Diinginkan dalam SIM-Data di Kabupaten Bandung

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi para pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Tujuan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber-sumber bagi para aktor yang terlibat, baik yang ada didalam lembaga maupun

yang ada diluar lembaga. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakinbesar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Dalam kaitan ini harus diakui bahwa salah satu kontribusi penting dari analisis implementasi ini adalah perhatiannya pada teori yang menyeluruh mengenahi bagaimana cara mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki. Hubungan yang baik suatu teori kausal mensyaratkan bahwa hubungan-hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah disatu pihak, dan tercapainya tujuan-tujuan program dapat dipahami dengan jelas.

Untuk memastikan keberhasilan suatu sistem manajemen data, personil manajemen data harus membuktikan bahwa mereka mampu mengurus data yang telah dipercayakan kepada mereka., karena kualitas data merupakan priorotas utama sistem informasi dan dengan memasukkan data dengan kualitas data yang baik. Kualitas data dapat ditingkatkan dengan menjaga integritas dan keamanan data. Menjaga keamanan data memang sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan data tersebut menyangkut data yang sifatnya *intern*. Dengan demikian diperlukan antisipasi untuk menjaga agar data tersebut aman. Hal yang dilakukan biasanya dengan menyimpan rapih data tersebut ke dalam sebuah tempat yang dianggap aman dan tidak diketahui orang banyak.

Menjaga kualitas, keamanan dan integritas data harus merupakan tujuan utama dari desain sistem informasi manajemen. Tujuan kedua adalah menfasilitasi akses data ya disimpan. Disamping itu, yang diperlukan antara pengumpulan data harus dipendekkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kehilangan data untuk memungkinkan memperbaiki data yang kurang baik atau mengkoreksi data yang salah.

Disamping itu, memasukkan data harus bertanggung jawab terhadap entri data, ini dimaksudkan untuk menjaga keteraturan dalam memasukan data tersebut. Dengan adanya pertanggung jawaban di seseorang di setiap SKPD maka membuat lebih mudah untuk memelihara integritas dan keamanan suatu database yang berkualitas tinggi. SIM-Data di buat sebagai prosedur standar untuk entri data, arsip, dokumtasi. SIM-Data sebagai tujuan untuk menjamin penanganan yang efisien dari serangkaian data yang terpisah.

Dalam wawancara peneliti terhadap beberapa SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung bahwa jelas banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya SIM-Data tersebut maka setiap laporan tidak akan hilang karena sudah disimpan dengan sistem tersebut dan mempermudah untuk setiap SKPD untuk memngambil atau melihat kembali data yang lama. Dengan asumsi ini bahwa jelas di bangunnya SIM-Data untuk semua SKPD di lingkungan Kabupaten bandung sebagai basis data atau penyimpanan data.

4.2.3 Ketersediaan Sumber Dana dalam Implementasi SIM-Data di Kabupaten Bandung

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulative dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut. Secara umum tersedianya dana amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

Pada saat ini dan yang akan datang sepertinya masyarakat akan dihadapkan dan mulai bergeser untuk memilih *Electonic Governance* dan meninggalkan interaksi-interaksi tradisional/manual yang banyak sekali menyita waktu, tenaga dan biaya. Tetapi dengan ketersediaan dana dan anggaran sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *Electonic Governance* yang akan diterapkan hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tentunya harus memiliki kekuatan yang cukup terhadap berbagai sumber daya yang ada dan memiliki kemauan untuk menganggarkannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks

ini, DPR ataupun DPRD dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN dan APBD sehingga APBN amupun APBD benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik dan dalam rangka mewujudkan *Electonic Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang lebih transaran

Pembangunan sistem inormsi dimana saja pasti tidak akan terlepas dari adanya sumber dana menjadi sesuatu yag vital karena secanggih ataupun sehebat apapun sistem tersebut tidak akan terbangun bila tidak ada sumber dana yang memadai. Besamya dana untuk pembuatan suatu sistem informasi akan sulit untuk diketahui kerena sistem informasi di bangun dari berbagai jenis mulai dari jaringan, *software,* maupun *hardware* semua komponen tersebut yang menjadi bahan utama dalam pembuatan sistem informasi ditambah bahan yang diperluakan dalam pembuatan sistem informasi masih mengimpor dari luar karena bahan yang diperlukan belum tersedia di dalam negeri sehingga dana yang diperlukan dalam membangun sistem informasi akan memakan banyak dana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SKPD terkait bahwa pembangunan SIM-Data di Kabupaten Bandung di dapat tidaknya hanya dari APDB Kabupaten Bandung saja tetapi sumber dananya didapat dari APBD Provinsi ataupun APBN pusat. Ini dilakukan agar angaran untuk pengembangan sistem informasi yang ada dilingkungan Kabupaten Bandung tidak di bebankan

di anggaran APBD sehingga terlalu memberatkan APBD Kabupaten Bandung karena tidak semuanya Pemkab Kandung bias memenuhinya. Maka dari itu anggaran merupakan sumber finansial yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka ketersediaan biaya sangat dibutuhkan untuk implementasi kebijakan SIM-Data, seperti untuk pengadaan sarana prasarana dalam SIM-Data. Ketersediaan biaya tersebut dalam pelaksanaannya untuk Berjalannya SIM-Data akan berguna dan lebih optimal. Tetapi persoalan yang sering dihadapi oleh seluruh SKPD adalah masalahketerlambatan pencairan anggaran,Keterlambatan ini bisa dimulai dari keterlambatan pemerintahdaerah mengajukan ke DPRD atau bisa juga keterlambatan pembahasan di DPRD. Hal ini berdampak terhadap terhadap ketersedian sarana dan prasarana dalam menunjang SIM-Data tersebut.

4.2.4 Keterkaitan Antar Instansi dalam Implementasi Kebijakan SIM-Data di Kabupaten Bandung

Kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi dilingkungan badan/instansi tertentu dan diantara sejumalh besar badan-badan lain yang telibat. Masalah koordinasi ini makin runyam jika menyangkut peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya seringkali amat tergantung pada pemerintah daerah. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

Badan pelaksana selain dapat memberikan kejelasan konsistensi tujuan, memperkecil hambatan, dan intensif yang memadahi bagi kepatuhan kelompok-kelompok sasaran, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebihlanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana. Dan pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pembuat undang-undang/peraturan untuk menjamin bahwa para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Tanggungjawab untuk implemetasi dapat ditugaskan pada badan-badan yang orentasi kebijakannya sejalan dengan peraturan dan bersedia menempatkan program pada prioritas utama.

Electonic Governance adalah salah satu upaya untuk menggunakan dan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi - TIK (*ICT- Information and Communication Technology*) oleh pihak pemerintahan, dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi, terkendali dan terukurnya kualitas kinerja pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melayani stakeholder – pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Pelaksanaan sistem informasi pada kantor pemerintah dapat terselenggara jika salah satu permasalahan yang dihadapi didalam pembangunan dan pengembangan e-government adalah sumberdaya manusia. Jika berbicara

Electonic Governance, ada dua aktivitas utama yang dilakukan yaitu membangun back office dalam hal ini membangun sistem informasi dan membangun front office dengan memanfaatkan TIK.

Jika dilihat kondisi yang ada saat ini di sejumlah kantor pemerintah, baik pusat maupun daerah, sumber daya manusia yang berlatar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi relatif masih kurang memadai, sehingga diperlukan suatu upaya perubahan manajemen, atau lebih dikenal sebagai *change management*. Adanya kerjasama yang baik antar instansi maka akan tumbuhhbungan kerja yang baik antar instansi di Kabupaten Bandung. Kerjasama yang antar instansi diperlukan untuk lebih memudahkan dalam mencari data, selain itu dengan adanya kerjasama yang baik maka suasana kerja akan lebih baik. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh SK[PD di lingkungan Kabupaten Bandung.

Melihat penjelelasan diatas dan berdasarkan wawancara peneliti bahwa untuk pembangunan ataupun pengembangan SIM-Data tersebut telah terlibatnya SKPD terkait di Kabupaten bandung dalam menjalankan SIM-Data tersebut karena SIM-Data digunakan sebgai alat pelaporan Laporan SKPD kepada Bupati sehingga keterlibatan SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung di dalam SIM-data itu memang ada.

4.2.5 Perekrutan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupatren Bandung

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi.

Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan,

dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Kemajuan perkembangan komputer dan telekomunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Dari sekian banyak sektor kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi, organisasi atau institusi merupakan entitas yang paling banyak mendapatkan manfaat. Bagi pemerintahan modern, sistem informasi dan teknologi informasi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dari waktu ke waktu.

Ketersediaan SDM dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan karena dengan tersedianya aparatur yang mencukupi maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan yang harus diperhatikan yaitu SDM tersebut harus memiliki pengetahuan yang menunjang, memiliki *skill* yang mendukung, adanya budaya berbagi informasi dan memiliki jumlah SDM yang memadai memiliki pengetahuan yang menunjang. Memiliki pengetahuan yang menunjang dalam implementasi kebijakan saat ini sangat diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pengetahuan akan teknologi informasi sangat diperlukan dengan adanya implementasi kebijakan aparatur harus siap melaksanakannnya. Salah satu cara untuk mengetahui pengetahuan SDM yang ada adalah melalui tingkat pendidikan

Bagi pemerintah yang melibatkan teknologi informasi dalam aktivitasnya sehari-hari, perjalanan implementasi yang ada merupakan sebuah evolusi. Karena proses ini tentu saja akan mengurangi resiko kegagalan akan penerapan sebab perubahannya secara perlahan dan sifatnya lebih terbuka. Sebelum teknologi informasi memiliki fungsi yang strategis dalam arti kata dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, teknologi informasi harus melalui skenario tertentu yang dimulai dengan peranannya sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Maka dari itu *skill* (keterampilan) yang mendukung sangat di butuhkan karena keterampilan dapat membantu dalam implementasi kebijakan SIM-Data. Keterampilan yang dimiliki oleh SDM saat ini khususnya dalam penerapan *e-Government* melalui SIM-Data sudah cukup baik. Namun seiring kemajuan teknologi yang semakin hari semakin baik serta semakin beragam kemudahan yang diberikan maka hendaknya dilakukan pelatihan khusus tentang *e-Government*.

Memiliki jumlah aparatur yang memadai. Ketersediaan jumlah aparatur dalam implementasi kebijakan SIM-Data haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan jumlah aparatur yang cukup maka proses penyampaian informasi akan lebih cepat. Karen yang sering menjadi kendala dalam SIM-Data tersebut dikarenakan jumlah SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya sangat sedikit. Dan berdasarkan wawancara dan observasi di setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung bahwa dalam hal personil di setiap SKPD yang

ahli di bidang sistem informasi sangat sedikit sedangkan yang bukan ahlinya di bidangnya sangat banyak di setiap SKPD-nya maka dari itu personil di setiap SKPD dilakukan pelatihan maka dari itu BAPAPSI selaku admin sistem tersebut selalu melakukan seminar atau pun pelatihan-pelatihan terhadap personil-personil di setiap SKPD di Kabupaten Bandung. Ini dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas personil di setiap SKPD agar dapat menggunakan sistem tersebut. Dengan seringnya diadakannya seminar dan pelatihan-pelatihan tersebut maka setiap personil di setiap SKPD agar mengerti dengan cara pengguan sistem informasi tersebut.

4.2.6 Transparasi di dalam SIM-Data di Kabupaten Bandung

Dalam iklim demokrasi sekarang ini transparansi di pemerintah menjadi amat penting bahkan merupakan hak asasi manusia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauhmana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi pendukung tujuan. Aktor-aktor diluar badan pelaksana yang mau dan mampu berpartisispasi untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dalam hal ini terlibatnya masyarakat didalamnya..

Istilah transparansi (*transparency*) yang banyak digunakan dalam diskusi dalam khazanah ilmu sosial-politik sebenarnya diadopsi dari ilmu fisika. Sebuah objek disebut transparan apabila dari objek tersebut seseorang dapat melihat atau

mengamati benda atau objek lainnya. Pengertian ini di dalam ilmu sosial-politik atau khususnya ilmu kebijakan publik kemudian berarti bahwa masyarakat secara umum (*civil society*) dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan yang diambil oleh para perumus kebijakan.

Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas, efisiensi atau kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Betapapun teknologi informasi memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasikan dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari.

Tentu saja, peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru dan akan sangat terbantu dengan digunakannya teknologi informasi. Yang tidak kalah penting ialah bahwa e-government secara keseluruhan akan dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata-pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global.

Melalui e-government, masyarakat juga akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tampak bahwa

konsep pengembangan e-government sangat erat kaitannya dengan konsep keterbukaan atau transparansi. Pada umumnya transparansi menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat Kurangnya transparansi akan mengakibatkan ketimpangan informasi. Dengan adanya transparansi maka pemerintah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktek KKN.

Hasil wawancara peneliti dengan BAPAPSI selaku admin dalam sistem tersebut dan SKPD yang lain selaku pengguna sistem tersebut mengemukakan bahwa sistem tersebut pada saat ini sedang ada revisi atau perubahan sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mengatahui segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD dan terutama menyesuaikan dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang0undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Maka dari itu BAPAPASI menyesuaikan dengan undang-undang tersebut dan pada akhirnya setelah SIM-Data telah selesai direvisi maka masyarakat dapat melihat langsung laporan setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung dengan menggunakan SIM-Data tersebut. Di samping itu dengan ditingkatkan transparansi maka diharapkan kualitas transparansi kepada publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government).*

4.2.7 Dukungan Publik Serta Perhatian Media Didalam Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena untuk dapat mencapai hasil implementasi kebijakan setiap program membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.

Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap manajemen informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga mendorong manajer untuk meningkatkan kemampuan kompetitif (*competitive advantage*) organisasi yang dikelolanya.

Dukungan publik dan media dalam sebuah sistem informasi sangatlah penting apalagi kalau sistem tersebut di gunakan oleh pemerintah selaku pelayan masayarakat. Karena dukungan publik dan media di dalamnya sangatlah vital sebagai penyeimbang di dalam kekuasaan pemerimtah. Sebab kalau tidak ada dukungan ataupun peran media pemerintah dengan kekuasaannya bisa bertindak sewenang-wenang bahkan bisa menjurusa dengan tindakakn otoriter. Keberadaan sistem informasi yang digunakan pemerintah sangat penting karena dengan adanya dukungan publik atau media maka keberadaan sistem informasi sangat membantu kinerja pemerintah di dalam membangun masyarakatnya.

Sistem informasi bisa dijadikan alat oleh pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya tetang kinerja pemerintahannya. Dengan adanya sistem informasi maka masyarakat akan selalu bisa menilai kinerja pemerintah. Apabila ada kelalaian ataupun kesalahan dapat di perbaiki oleh pemerintah. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang telah berkembang di masyarakat, hampir semua instansi pemerintah telah memiliki halaman web sendiri. Melalui *website* ini instansi pemerintah telah dapat menyajikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan perencanaan pembangunan, struktur organisasi tata kerja, pelayanan publik, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Namun belum ada *website yang diteliti* yang mempublikasikan laporan setiap SKPD secara transparan dan akuntabel. Strategi yang ditawarkan dalam hal pembaharuan teknologi ini adalah mengoptimalkan penggunaan website instansi pemerintah dengan mengupayakan lebih transparan dan dapat digunakan langsung oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa SIM-Data tersebut memang masih ada kekurangannya yaitu memang belum ada dukungan dari publik ataupun media karena sampai saat ini SIM-Data masih bersifat intranet atau inetrn dan hanya SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung yang dapat mengunakannya. Tetapi BAPAPSI kan selaku admin tersebut sedang melakukan

revisi terhadap SIM-Data tersebut supaya masyarakat dapat menggunakan SIM-Data untuk keperluannya.

SIM-Data tersebut setiap laporan tidak akan hilang karena sudah disimpan dengan sistem tersebut dan sumber finansial yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena ini suatu komponen yang haus di penuhi agar sistem tersebut dapat berjalan, dan yang terpentimg terlibatnya SKPD terkait di Kabupaten bandung dalam menjalankan SIM-Data tersebut dan dalam pemberdayaan sumber daya manusia BAPAPSI terus melaukan pelatih dan seminar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada dilingkungan Kabupaten Bandung.

4.3 Tahapan dalam Proses SIM-Data di Kabupaten Bandung

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi p0la-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan

yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

4.3.1 Pemahaman Instansi, Kepatuhan Objek dan Hasil Nyata Didalam Implementasi Kebijakan SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama. Dan yang berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioitas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi, penyajian informasi dibidang pemerintahan pun telah dapat dilakukan secara elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah atau unsur dalam melaksanakan kebijakan SIM-Data. SIM-Data digunakan sebagai alat untuk memasukan laporan dari setiap SKPD kepada bupati. Dalam hal laopran-laporan dari setiap SKPD harus dilaporkan melalui SIM-Data selanjutnya hasilnya di

koreksi atau di periksa oleh bupati. Maka dari itu setiap instansi dituntut agar memahami tentang SIM-Data tersebut.

Dalam hal pemahaman SIM-Data sendiri setiap SKPD telah memahaminya secara baik itu bisa dilihat dari observasi saya di setiap SKPD bahwa mereka telah mengerti tentang kebijakan SIM-Data tersebut. Dalam hal ini prosedur dalam memasukan laporan dan laporan apa saja yang harus di laporkan ke dalam SIM-Data tersebut.

Prosedur laporan yang harus dimasukan adalah laporan-laporan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap SKPD ataupun laporan hasil kinerja setiap SKPD. Prosedur laporan yang siap di laporkan harus laporan yang telah disetujui oleh pimpinan dari setiap SKPD. Sedangkan jenis laporannya tidak harus spesifik.

Beradasarkan hasil wawancara di BAPAPSI bahwa pemahaman setiap SKPD akan terus ditingkatkan karena ini disesuaikan dengan perubahan yang sering terjadi dari jal kebijakannya ataupun dari segi sistem informasinya sendiri dal hal ini SIM-Data tersebut. Sedangkan untuk kepatuhannya objek, dalam hal ini SKPD dalam menjalankan kebijakan SIM-Data perlu kita apresiasikan karena dengan adanya SIM-Data maka seluruh laporan dari semua SKPD dapat tersusun dengan baik dan rapih dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sebuah sistem yang terpadu berdasarkan pada anggapan bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan. Integrasi data dicapai melalui “data base”. Pada sebuah sistem pengolahan informasi, “data base” terdiri dari semua data

yang dapat dijangkau oleh sistem. Pada SIM berdasarkan komputer, istilah “data base” biasanya dipakai khusus untuk data yang dapat dijangkau secara langsung oleh komputer. Manajemen sebuah “data base” adalah sebuah sistem perangkat lunak komputer yang disebut sebagai sebuah sistem manajemen “data base”.

Kecenderungan dalam pengolahan transaksi pada sistem-sistem mutakhir adalah menuju pengumpulan data secara “online” dan permintaan informasi (*inquiry*) secara online pula. Kemampuan memperoleh informasi secara online sangat besar peranannya dalam mendukung informasi. Hasil nyata dalam kebijakan SIM-Data adalah berupa dasar hukum dalam pembangunan sistem tersebut dan SIM-Data tersebut sendiri. Dalam SIM-Data *output* atau hasil yang akan dikeluarkan dalam sistem tersebut adalah basis data atau penyipanan data secara elektonik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa hasil dalam implementasi kebijakannya berupa sistem informasinya tetapi kekurangan dari SIM-Data yaitu sistem ini hanya bersifat intranet dan hanya digunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung. Sementara dampak untuk masyarakat sendiri belum ada hasilnya ini dikarenakan sistemnya masih intanet dan tidak dipublikasikan untuk saat ini.

4.3.2 Revisi atas Kebijakan Yang Diimplemtasikan Di SIM-Data Di Kabupaten Bandung

Pada bahasannya kegiatan, tujuan kebijakan serta metode pengevaluasian program telah melakukan suatu upaya khusus untuk menggambarkan bentuk di mana penilaian-penilaian dibuat terhadap program yang tengah berjalan serta teknik ilmiah terbaru dan riset evaluasi. Yang belakangan ini dikaitkan dengan suatu profesi baru yang salah satunya berpegangan pada jurnal, pada buku baru pegangan, bahasa, dan masyarakat. Terciptnya suatu profesi tidak lantas menguakkan banyak permasalahan yang telah menjadi karakteristikdari evaluasi program yang efektif. Semua permasalahan ini juga berurat dan berkar pada politik, adalah suatu hal yang wajar apabila temuan-temuan para evaluator baru dipakai dalam proses-proses, yang dengannya para politisi memutuskan apa yang akan dilakukan kemudian. Oleh karena itu sebuah pandangan tentang evaluasi yang lebih komperhensif telah ditekankan, melebihi pandangan yang hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dalam mengukur dampak-dampak programatis. Dalam proses kebijakan telah menilai perlunya penekanan terhadap konteks evaluasi yang lebih luas.

Yang termaktub dalam proses kebijakan publik adalah evaluasi dan dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang tengah atau telah dilaksanakan. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam

melaksanakan evaluasi kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan dirmaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut

dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri.

Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kebermanfaatan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada bagian ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada subtansi dari kebijakan public yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan public dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya aialah tujuan telah tercapai tetapi maslah tidak terselesaikan.

Evluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. Fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekuranagn tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang.

Revisi dalam hal ini tidak ubahnya dengan evaluasi karena segala sesuatu di dalam implementasi ataupun sistemnya setiap tahun akan di evalusi dan akan direvisi apabila kebijakan dan sistemnya memang harus diubah sesuai dengan

perkembangnnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa revisi atas kebijakan tersebut telah dilakukan dan evaluasinya secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali kebijakan dan sistemnya selalu di revisi. Karena sistem ini baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun maka revisi terhadap kebijakan ataupun sistemnya belum terlalu banyak dan revisi terbatu adalah penyesuaian dengan undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Hasil dalam implementasi kebijakannya berupa sistem informasinya tetapi kurang berjalannya dari SIM-Data yaitu sistem ini hanya bersifat intranet dan hanya digunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung. Sementara dampak untuk masyarakat sendiri belum ada hasilnya masih kurang baik ini dikarenakan sistemnya masih intanet dan tidak dipublikasikan untuk saat ini. Revisi atas kebijakan tersebut telah dilakukan dan evaluasinya secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali kebijakan dan sistemnya selalu di revisi. Karena sistem ini baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun maka revisi terhadap kebijakan ataupun sistemnya belum terlalu banyak dan revisi terbaru adalah penyesuaian dengan undangundang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.